BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Analisis Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil observasi, isu-isu strategis Kecamatan Belakang Padang yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga isu utama. Isu pertama mengenai letak administratif dan kondisi geografis wilayahnya, isu kedua mengenai sejarah perkembangan dan kebudayaannya, dan isu terakhir mengenai potensi kelautan Kecamatan Belakang Padang.

4.1.1 Isu Geografis dan Pertahanan & Keamanan Kecamatan Belakang Padang

Letak Kecamatan Belakang Padang terpisah dari daratan utama Kota Batam yaitu Pulau Batam, yang dimana posisinya berada di sebelah barat sampai barat laut Pulau Batam dan berhadapan langsung dengan Negara Singapura. Adapun batas sebelah utara kecamatan ini adalah Selat Philip yang merupakan jalur pelayaran internasional. Selain itu Kecamatan Belakang Padang terdiri dari beberapa pulau dengan gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil sebanyak kurang lebih 131 pulau dengan komposisi sebanyak 47 pulau berpenghuni dan 84 pulau tidak berpenghuni, serta memiliki luas perairan yang lebih besar daripada luas daratannya.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Belakang Padang memiliki potensi permasalahan yang sangat rawan terjadi seperti hilangnya pulau dari gugusan kepulauan NKRI, konflik wilayah perbatasan dengan negara tetangga, pengerukan pasir pada pulau-pulau kecil, hingga masalah kriminalitas oleh kapal-kapal yang melewati wilayah jalur pelayaran internasional seperti pembuangan limbah B3 yang dapat merusak ekosistem laut. Permasalahan-permasalahan tersebut sudah sering terjadi di wilayah perbatasan Indonesia, salah satu contohnya seperti pada kasus Sipadan dan Ligitan yang kini hilang dari gugusan kepulauan NKRI. Kasus tersebut menjadi pelajaran yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kembali pada wilayah perbatasan Indonesia lainnya. Menjaga pertahanan dan kemanan wilayah perbatasan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Sulitnya untuk tetap menjaga kemanan wilayahnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Belakang Padang tersebut. Dibutuhkan beberapa instrumen pertahanan dan keamanan baik infrastruktur pertahanan dan kemanan yang layak dan lengkap maupun peraturan-peraturan yang secara tegas mengarahkan dan memberi perlindungan pada pulau-pulau terdepan demi menjamin kemanan wilayah perbatasan dan keutuhan wilayah NKRI. Maka berdasarkan aspek geografis, menjadi penting untuk memperhatikan wilayah perbatasan karena merupakan kunci utama untuk tetap mempertahankan kesatuan wilayah NKRI.

4.1.2 Peran Kecamatan Belakang Padang

Letak administratif dan kondisi geografis Kecamatan Belakang Padang telah menggambarkan bahwa kecamatan ini memiliki posisi yang sangat strategis. Kecamatan Belakang Padang memiliki peran sebagai kawasan *hinterland* bagi Kota Batam. Tercantum dalam rencana struktur ruang RTRW Kota Batam beberapa arahan untuk Kecamatan Belakang Padang yaitu sebagai pusat penunjang kegiatan budidaya di wilayah laut, pusat pelayanan lingkungan perumahan, kawasan perlindungan hutan *mangrove*, serta kawasan cagar budaya perkampungan tua. Selain itu, berdasarkan letak administratifnya, Kecamatan Belakang Padang ini merupakan muka terdepan bagi Kota Batam, sehingga memiliki peran sebagai gerbang yang akan dilewati untuk menuju Kota Batam khususnya dari Singapura, serta akan selalu dilewati oleh pelayaran internasional karena berhadapan langsung dengan Selat Philip yang merupakan jalur pelayaran internasional.

Keterbatasan wilayah daratan dan geografisnya yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, menyebabkan Kecamatan Belakang Padang ini menjadi sulit untuk dilakukan pembangunan seperti Kota Batam hingga saat ini. Oleh sebab itu kecamatan ini diubah perannya sebagai wilayah *hinterland* bagi Kota Batam. Peran Kecamatan Belakang Padang sebagai wilayah *hinterland* dan sebagai gerbang bagi Kota Batam, menjadikan kecamatan ini memiliki peranan penting bagi Kota Batam, sehingga pengembangannya perlu diperhatikan secara khusus. Dengan memperhatikan karakteristiknya sebagai kecamatan terdepan,

pengembangan potensi wilayah dan pengamanan kawasan perbatasan menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pengembangan kecamatan Kecamatan Belakang Padang ini. Oleh sebab itu, berdasarkan aspek peran wilayahnya, maka sangat perlu arahan untuk pengembangan potensi daerah agar perannya sebagai wilayah *hinterland* dapat berjalan optimal.

4.1.3 Nilai Historis Kecamatan Belakang Padang

Kecamatan Belakang Padang merupakan kecamatan tertua di Kota Batam yang hampir terlupakan dari gerak pembangunan Kota Batam hingga saat ini. Dahulunya kecamatan ini merupakan Ibu Kota Kecamatan Batam ketika masih berada di bawah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Namun setelah adanya pemekaran wilayah dan perubahan kotamadya menjadi kota, serta luas wilayah Kecamatan Belakang Padang yang terbatas, sehingga ibu kota kecamatan Kota Batam dipindahkan ke Pulau Batam. Berasarkan hal tersebut, kini Kecamatan Belakang Padang hanya menjadi salah satu wilayah *hinterland* di Kota Batam. Setelah adanya perubahan dan pemekaran tersebut, pengembangan Kota Batam hanya terpusat di Pulau Batam. Banyak nilai-nilai historis yang terdapat di Kecamatan Belakang Padang ini, dikarenakan kecamatan ini merupakan kecamatan tertua di Kota Batam dan menjadi awal mula berkembangnya Kota Batam.

Meskipun kecamatan ini menjadi wilayah *hinterland* di Kota Batam, namun memiliki peran yang sangat penting bagi keutuhan dan perkembangan Kota Batam. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada letak administratif Kecamatan Belakang Padang, dimana kecamatan ini terletak di paling depan dan menghadap langsung ke wilayah Singapura, sehingga perkembangannya juga dapat menjadi cerminan mengenai bangsa Indonesia khususnya Kota Batam. Nilai-nilai historis yang ada didalamnya dapat menjadi salah satu potensi pengembangan Kecamatan Belakang Padang sebagai wilayah terdepan di Kota Batam salah satunya seperti pengembangan potensi pariwisata sejarah. Berdasarkan aspek nilai historis Kecamatan Belakang Padang merupakan salah satu saksi sejarah dengan berbagai peninggalannya yang mengawali pesatnya pembangunan di Kota Batam hingga saat ini.

4.1.4 Kebudayaan Masyarakat Kecamatan Belakang Padang

Masyarakat Kecamatan Belakang Padang merupakan masyarakat tradisional dan menganut kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Belakang Padang ini masih sangat kental secara turun-temurun dan masih dilakukan dalam kehidupan mereka sehari, baik dari bahasa, kebiasaan masyarakat, makanan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kebudayaan Melayu yang ada di Kecamatan Belakang Padang, kebudayaan Melayu memang menjadi dasar kebudayaan Kota Batam, namun dengan pesatnya perkembangan Kota Batam dan kemajuan zaman yang dibarengi dengan perkembangan teknologi, menyebabkan kebudayaan Melayu di Kota Batam mulai terkikis. Selain itu, masyarakat Kecamatan Belakang Padang juga merasakan perbedaan kebudayaan yang dibawa oleh wisatawan asing yang datang ke wilayah mereka. Hal tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Kecamatan Belakang Padang untuk melestarikan kebudayaan Melayu di wilayahnya agar tidak hilang terkikis perkembangan zaman.

Sebagai kecamatan tertua yang mengawali perkembangan Kota Batam hingga saat ini, banyak warisan-warisan kebudayaan Melayu yang ada di kecamatan ini. Warisan kebudayaan tersebut perlu untuk dilestarikan karena dapat menjadi suatu karakteristik khas daerahnya. Oleh sebab itu, demi menjaga kelestariannya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, dibutuhkan perhatian dan pengembangan khusus untuk tetap mempertahankan warisan-warisan kebudayaan yang ada di Kecamatan Belakang Padang sebagai salah satu karakteristik asli wilayahnya. Selain itu, warisan kebudayaan tersebut juga berpotensi untuk dijadikan wisata sejarah maupun wisata budaya, yang hasilnya akan dapat menambah pendapatan daerahnya. Berdasarkan aspek kebudayaan masyarakat Kecamatan Belakang Padang, dibutuhkan arahan-arahan dan program untuk dapat mengembangkan potensi kebudayaan Melayu sebagai karakteristik khas daerahnya yang masih sangat kental dianut oleh masyarakat setempat.

4.1.5 Isu Potensi Kelautan Kecamatan Belakang Padang

Pengembangan potensi daerah dapat menjadi salah satu alat untuk pertahanan negara, karena dengan pengembangan potensi daerah tersebut secara tidak langsung infrastruktur akan ikut dikembangakan guna mendukung pengembangan potensi daerah tersebut, sehingga pulau-pulau di wilayah perbatasan akan tetap terjaga di gugusan kepulauan NKRI. Selain itu pengembangan potensi daerah juga akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerahnya. Kondisi geografis Kecamatan Belakang Padang yang terdiri dari pulau-pulau dan luas wilayah perairannya lebih besar daripada luas wilayah daratannya, memberikan nilai tambahan pada kecamatan ini yaitu potensi kelautan yang cukup besar dan dapat dikembangkan.

Potensi kelautan yang dapat dikembangkan di Kecamatan Belakang Padang terdiri dari budidaya perikanan, rumput laut, rengkam, terumbu karang buatan, hutan bakau/*mangrove*, dan wisata pantai. Apabila dikembangkan, potensi-potensi kelautan tersebut akan dapat meningkatkan promosi daerah dan perekonomian masyarakat dan daerah. Pengembangan potensi daerah juga merupakan salah satu upaya pemerataan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan wilayah perbatasan sangat rawan dengan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan perbatasan dengan negara lain yang sangat krusial. Oleh sebab itu, pengembangan potensi daerah baik potensi kelautan ataupun non kelautan sangat perlu untuk dikembangkan khususnya untuk daerah-daerah di wilayah perbatasan antar negara. Sehingga berdasarkan aspek potensi kelautan Kecamatan Belakang Padang yang berpotensi untuk dikembangkan, maka program-program pengembangan sangat dibutuhkan agar potensi kelautan yang ada dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

4.2 Model *Analytic Hierarchy Process* (AHP) Dalam Penentuan Prioritas Program Pengembangan 'Pulau Penawar Rindu' Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam

Model AHP yang dirumuskan dan diajukan dalam penelitian ini terdiri dari tujuan, kriteria dan prioritas. Prioritas yang dimaksud adalah prioritas program-program pengembangan Kecamatan Belakang Padang sebagai

kecamatan terdepan di Kota Batam dengan berdasar kepada kegiatan maupun arahan yang terkandung dalam dokumen rencana daerah yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas program pengembangan Kecamatan Belakang Padang.

4.2.1 Perumusan Tujuan (*Goal*)

Tujuan pada metode AHP ini adalah **Pemilihan Prioritas Program Pengembangan Kawasan 'Pulau Penawar Rindu' Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam**. Secara khusus tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan urutan prioritas program pengembangan Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan yang telah dirumuskan berdasarkan arahan dalam dokumen-dokumen rencana daerah dan disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya yang telah dijabarkan dalam analisis isu-isu strategis. Kecamatan Belakang Padang memiliki karakteristik khusus seperti letaknya yang strategis yaitu terletak paling depan dari Kota Batam dan berhadapan langsung dengan Selat Philip yang merupakan jalur pelayaran internasional dan Negara Singapura, geografis wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau, luas perairannya lebih besar daripada luas daratannya, memiliki nilai-nilai historis dan warisan budaya Melayu yang kaya, masyarakat yang pada umumnya merupakan masyarakat tradisional, serta perannya sebagai wilayah *hinterland* Kota Batam dan merupakan kecamatan terdepan. Berdasarkan karakteristik-karakteristik Kecamatan Belakang Padang tersebut menyebabkan perlunya melakukan prioritas program pengembangan Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam agar program-program tersebut dapat berjalan dengan optimal.

4.2.2 Perumusan Kriteria-Kriteria Penilaian

Dalam pemilihan prioritas program pengembangan Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam diperlukan kriteria-kriteria penentu sebagai bahan penilaian terhadap prioritas program pengembangan. Kriteria-kriteria penilaian ini dirumuskan berdasar pada isu-isu strategis

Kecamatan Belakang Padang yang telah dianalisis sebelumnya. Adapun kriteria-kriteria penilaian dalam penelitian ini yaitu:

1. **Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan**. Pengembangan berbasis ekonomi kelautan ini dirumuskan berdasarkan isu mengenai potensi kelautan di Kecamatan Belakang Padang. Kota Batam khususnya Kecamatan Belakang Padang terdiri dari pulau-pulau yang letaknya tersebar di seluruh wilayah administratifnya. Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah mengamanatkan dalam delapan misi pembangunan Indonesia kedepan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan, dijelaskan bahwa salah satu misi pembangunan Indonesia dalam 25 tahun kedepan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan cara menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Oleh karena Kecamatan Belakang Padang yang luas wilayah perairannya lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya, serta terdiri dari beberapa pulau, maka pengembangan berbasis ekonomi kelautan ditetapkan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam pemilihan prioritas program pengembangan kawasan ‘Pulau Penawar Rindu’ Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam.
2. **Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan**. Pengembangan berbasis pariwisata dan kebudayaan merupakan kriteria yang dirumuskan berdasarkan isu strategis nilai historis, kebudayaan masyarakat dan potensi kelautan di Kecamatan Belakang Padang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, salah satu arahan untuk Kecamatan Belakang Padang yaitu berbasis pariwisata. Kecamatan Belakang Padang memiliki beberapa potensi pariwisata salah satunya seperti sumber daya alam yang indah,

keindahan panorama Negara Singapura, kebudayaan khas daerah yang masih sangat kental baik berupa kesenian, bahasa, arsitektur bangunan, kuliner, even lomba perahu layar, dan lain sebagainya. Kecamatan Belakang Padang juga merupakan kecamatan tertua di Kota Batam, serta tidak luput dari sejarah pesatnya perkembangan Kota Batam saat ini. Kecamatan Belakang Padang memiliki karakteristik Kebudayaan Melayu Kepulauan, salah satu contohnya yaitu perkampungan tua di atas air dan perkampungan tradisional Melayu. Selain itu adanya potensi budaya heritage yang dapat menjadi potensi dan dikembangkan menjadi ciri khas kawasan, yaitu permainan tradisional gasing. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam juga tercantum bahwa Kecamatan Belakang Padang merupakan salah satu pengembangan kawasan perkampungan tua dan perkampungan tradisional Melayu yang termasuk dalam kawasan cagar budaya. Selain itu letak pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang yang berada pada posisi terdepan dan berhadapan langsung dengan Negara Singapura dengan jarak yang sangat dekat, sehingga pengembangan potensi berbasis pariwisata dan kebudayaan ditetapkan menjadi salah satu kriteria pengembangan kecamatan ini sebagai kecamatan terdepan demi meningkatkan pengembangan wilayahnya.

3. **Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut**. Pengembangan berbasis pelestarian ekosistem laut merupakan kriteria yang berangkat dari isu potensi kelautan Kecamatan Belakang Padang. Kecamatan Belakang Padang yang pada dasarnya merupakan kecamatan yang terdiri dari beberapa pulau, memiliki potensi kelautan yang dapat meningkatkan pengembangan daerahnya. Dengan melestarikan ekosistem laut yang ada di kecamatan ini diharapkan mampu mendorong pembangunan wilayahnya. Dalam rencana – rencana daerah tercantum salah satu pengembangan yang perlu dilakukan di Kecamatan Belakang Padang ini meliputi pelestarian terumbu karang yang juga bertujuan untuk melestarikan jumlah dan jenis ikan, perlindungan kawasan *mangrove*, reklamasi pantai, pelarangan penambangan pasir, pelarangan pengeboman ikan, serta pengembangan pariwisata bahari yang juga memerlukan kegiatan pelestarian ekosistem lautnya.

4. **Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara**. Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara merupakan kriteria yang dirumuskan berdasatkan isu mengenai peran Kecamatan Belakan Padang serta isu mengenai letak dan geografis Kecamatan Belakang Padang. Letak administratif Kecamatan Belakang Padang yang berhadapan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura, mengharuskan adanya pengembangan yang berbasis pertahanan dan kemanan negara menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan Kecamatan Belakang Padang ini. Tidak hanya dengan pemenuhan infrastruktur dan satuan militer sebagai penjaga wilayah perbatasan, namun dapat juga dilakukan dengan pengembangan potensi daerah, pemenuhan fasilitas umum dan sosial, reklamasi pantai agar tidak terjadi abrasi dan menghilangnya pulau, dan lain sebagainya. Berdasarkan pelajaran dari permasalahan terdahulu mengenai pulau-pulau terluar dan terdepan, pengembangan berbasis pertahanan dan kemanan negara sangat perlu diperhitungkan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.1
Perumusan Kriteria-Kriteria Penilaian Berdasarkan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Isu	Keterangan
1	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	• Potensi Kelautan Kecamatan Belakang Padang	Memiliki potensi besar untuk dikembangkan demi meningkatkan perekonomian
2	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	• Nilai Historis Kecamatan Belakang Padang • Kebudayaan Masyarakat Kecamatan Belakang Padang	Nilai historis dan kebudayaan kawasan yaitu Melayu yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pariwisata
3	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	• Potensi Kelautan Kecamatan Belakang Padang	Ekosistem laut yang perlu dilestarikan demi menjaga kelestarian lingkungannya
4	Pelestarian Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	• Peran Kecamatan Belakang Padang • Geografis dan Pertahanan & Kemanan Kecamatan Belakang Padang	Wilayah perbatasan yang membutuhkan perhatian khusus demi menjaga keutuhan NKRI

Sumber : Hasil Analisis, 2014

4.2.2.1 Gambaran Umum Ekonomi Kelautan Kecamatan Belakang Padang

Ekonomi kelautan adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan semua aktivitas ekonomi yang terdapat di wilayah hulu daratan yang menggunakan bahan baku (*raw materials*)-nya berasal dari wilayah pesisir atau lautan. Indonesia diberkahi Allah SWT dengan kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya alam yang dapat pulih (seperti perikanan, terumbu karang, hutan *mangrove*, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi); sumberdaya alam yang tak dapat pulih (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut (Dahuri, 2003).

Menurut Daruhi, sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan, yakni:

1. Perikanan tangkap;
2. Perikanan budidaya;
3. Industri pengolahan hasil perikanan;
4. Industri bioteknologi kelautan;
5. Pertambangan dan energi;
6. Pariwisata bahari;
7. Perhubungan laut;
8. Industri dan jasa maritim;
9. Sumber daya wilayah pulau-pulau kecil;
10. Sumber daya non-konvensional seperti *deep sea water industries, hydrothermal vents*;
11. Benda-benda berharga asal muatan kapal tenggelam (harta karun di dasar laut).

Kecamatan Belakang Padang merupakan kecamatan yang terdiri dari beberapa pulau dengan luas perairannya lebih besar daripada luas daratannya, sehingga menyebabkan kecamatan ini memiliki potensi kelautan yang cukup besar untuk wilayahnya. Kegiatan perekonomian yang berbasis kelautan di Kecamatan Belakang Padang terdiri dari kelong, keramba, budidaya rumput laut, budidaya rengkam (dipergunakan untuk bahan-bahan pembuatan kosmetik), pariwisata

bahari dan pelestarian terumbu karang buatan. Nelayan di kecamatan ini masih menggunakan cara tradisional untuk kegiatan penangkapan ikan, seperti menggunakan jaring, pukat, dan memancing. Hasil tangkapan ikan mereka sebagian besar diletakkan pada keramba dan kelong untuk kemudian dikembang biakkan. Selain untuk dikembang biakkan, ada pula nelayan yang langsung menjual hasil tangkapannya. Kelong-kelong yang ada di Kecamatan Belakang Padang ini merupakan milik perseorangan/pribadi tanpa adanya bantuan dari pemerintah, begitu pula dengan keramba yaitu milik perseorangan/pribadi, namun untuk keramba sebagian nelayan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti alat-alat untuk keperluan penangkapan ikan. Selain bantuan berupa alat-alat, pemerintah juga melakukan kegiatan pelatihan dan binaan untuk nelayan-nelayan tersebut, demi meningkatkan hasil produksi kelautan di Kecamatan Belakang Padang ini.

4.2.2.2 Gambaran Umum Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan Belakang Padang

Menurut Spillane (dalam Setiawan 2011:14), pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, yang bersifat sementara dan dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Untuk dapat menjadi suatu daerah tujuan wisata yang baik maka kita harus mengembangkan tiga hal yaitu:

1. *Something to see*, adalah segala sesuatu yang menarik untuk dilihat;
2. *Something to buy*, adalah segala sesuatu yang menarik atau mempunyai ciri khas tersendiri untuk dibeli;
3. *Something to do*, yaitu suatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat tersebut.

Untuk pengembangan suatu daerah tujuan wisata ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Harus mampu bersaing dengan objek wisata yang ada di daerah lain;
2. Memiliki sarana pendukung yang memiliki ciri khas tersendiri;

3. Harus tetap tidak berubah dan tidak berpindah-pindah kecuali di bidang pembangunan dan pengembangan; dan
4. Harus menarik.

Sedangkan kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan wujud ideal yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba yang ada dalam pikiran manusia yang dapat berupa gagasan, ide, norma, keyakinan, dan lain sebagainya. Dalam setiap kebudayaan terdapat unsur-unsur yang juga dimiliki oleh berbagai kebudayaan lain. Menurut Koentjaraningrat unsur-unsur kebudayaan yang universal meliputi:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan;
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan;
3. Sistem pengetahuan;
4. Bahasa;
5. Kesenian;
6. Sistem mata pencaharian hidup; dan
7. Sistem teknologi dan peralatan.

Berdasarkan unsur-unsur kebudayaan yang universal tersebut dikelompokan kedalam tiga wujud kebudayaan yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya;
2. Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam suatu masyarakat;
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Kecamatan Belakang Padang memiliki potensi dibidang pariwisata dan kebudayaan. Adapun kegiatan-kegiatan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kecamatan Belakang Padang saat ini yaitu:

1. Dikir Barat, yaitu syair berupa pantun yang berisi nasihat. Dikir barat ini terdiri dari penyanyi dan pemusik dan biasa diadakan saat diselenggarakannya acara-acara resmi maupun tidak resmi. Pihak Kecamatan Belakang Padang kini sedang menggalakan untuk melestarikan budaya tersebut agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman yang semakin modern;

2. Gasing, merupakan salah satu permainan tradisional yang dilestarikan di Kecamatan Belakang Padang. Di kecamatan ini pernah melahirkan tokoh gasing yang juga berperan sebagan sebagai Presiden Gasing ASEAN yaitu Alm. Jumain. Sepeninggal beliau, julukan raja gasing dipegang oleh bapak M. Abbas yang sampai saat ini masih aktif sebagai pemain gasing. Belakang Padang memiliki Gelanggang Gasing bernama Datuk Setia Amanah yang diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau;
3. Pencak Silat, nama perguruan pencak silat di Kecamatan Belakang Padang yaitu "Karang Taliwang" yang bertempat di Kampung Jawa;
4. Tari-tarian melayu dan makan sirih, makan sirih merupakan semacam ritual yang harus dilakukan oleh tamu-tamu khusus saat pembukaan suatu acara. Pada saat pembukaan acara tamu biasanya disuguhkan tarian persembahan dan diakhir tarian tersebutlah tamu-tamu khusus diminta untuk memakan sirih yang dibawakan oleh salah sorang penari;
5. Lomba sampan layar dan *sea eagle boat*. Lomba sampan layar telah berlangsung sejak 1959 di Kecamatan Belakang Padang. Melalui lomba sampan layar tersebut dapat menggerakan dan mengangkat nilai-nilai tradisional, khususnya masyarakat melayu yang penuh kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Lomba tersebut biasanya dilaksanakan pada momen 17 Agustus karena momen tersebut merupakan momen yang tepat untuk melestarikan atau mereview kembali kegiatan serupa beberapa puluh tahun lalu. Selain itu terdapat pula lomba *Sea Eagle Boat Race* yang digelar rutin oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pemerintah Kota Batam. Biasanya acara ini tidak hanya diikuti oleh tim dayung lokal, namun dimeriahkan juga oleh tim-tim dari negeri tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Lomba ini digelar untuk mengembangkan kepariwisataan Batam sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya rakyat pesisir;
6. *Diving* terumbu karang. Terumbu karang yang dijadikan sebagai wisata *diving* di Kecamatan Belakang Padang ini merupakan terumbu karang buatan yang sengaja dilestarikan oleh masyarakat setempat. Selain untuk melestarikan ekosistem laut, pelestarian terumbu karang ini juga menjadi salah satu sarana pariwisata untuk Kecamatan Belakang Padang;

7. Wisata pantai pasir putih. Wisata pantai yang paling terkenal di Kecamatan Belakang Padang ini adalah Pantai Pasir Putih yang berada di Kampung Bugis. Wisata pantai ini masih dikelola oleh perseorangan dan belum ada campur tangan dari pemerintah.

4.2.2.3 Gambaran Umum Pelestarian Ekosistem Laut Kecamatan Belakang Padang

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Dapat disimpulkan bahwa ekosistem laut merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup laut dengan lingkungannya. Namun menurut Nybakken (1988) ekosistem laut merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi. Lautan menutupi lebih daripada 80 persen belahan bumi selatan tetapi hanya menutupi 61 persen belahan bumi utara, dimana terdapat sebagian besar daratan bumi.

Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik atau yang hidup dan yang tidak hidup. Ekosistem laut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Ekosistem pantai, letaknya berhadapan langsung dengan daratan dan juga merupakan wilayah pasang surut;
2. Ekosistem muara, merupakan titik pertemuan antara ekosistem laut dengan ekosistem sungai;
3. Ekosistem terumbu karang, merupakan jenis ekosistem yang didominasi bebatuan karang dan dihuni banyak organisme atau biota laut.

Di Kecamatan Belakang Padang terdapat beberapa ekosistem laut yang sangat perlu untuk dilestarikan dan dijaga keberadaannya, salah satunya seperti hutan bakau atau *mangrove* dan terumbu karang sebagai tempat perkembang biakan dan rumah bagi ikan-ikan dan makhluk hidup laut lainnya. Hingga saat ini pihak kecamatan sedang menggalakkan penanaman kembali pohon-pohon bakau yang telah rusak karena kurangnya perhatian baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak swasta yang berinvestasi disekitar pulau-pulau Kecamatan

Belakang Padang yang memberi dampak negatif bagi ekosistem laut di sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Belakang Padang ini terdapat kegiatan pembuatan terumbu karang buatan dan unja yaitu tempat perkembang biakan dan bermainnya ikan. Pihak pemerintah juga telah melakukan pelarangan pengerukan pasir, pengeboman ikan, tuba/meracun ikan dan membuang sampah sembarangan, karena hingga saat ini masih banyak sampah-sampah yang mengapung di sekitar perairan Kecamatan Belakang Padang. Selain itu, pemerintah telah membuat program reklamasi pantai dengan membuat batu miring untuk mencegah abrasi yang dapat berdampak pada hilangnya pulau.

4.2.2.4 Gambaran Umum Pertahanan dan Keamanan Negara di Kecamatan Belakang Padang

Pertahanan dan keamanan negara disebut juga dengan pertahanan dan keamanan nasional. Secara umum pertahanan nasional merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan keamanan nasional dapat dimaknai baik sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia disamping kesejahteraan. (*Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional: Kemanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Kemanan Bagi Bangsa Indonesia*).

Salah satu pulau di Kecamatan Belakang Padang yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu Pulau Nipah, karena beredarnya isu mengenai hilangnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Pada kenyataannya Pulau Nipah ini mengalami abrasi serius akibat pengerukan pasir laut di sekitarnya. Pasir tersebutlah yang dijual ke Negara Singapura untuk mereklamasi pantainya. Oleh sebab itu, kini pihak pemerintah telah melakukan pelarangan penambangan pasir di seluruh wilayah Kecamatan Belakang Padang agar tidak terjadi seperti Pulau Nipah tersebut. Selain itu, di Kecamatan Belakang Padang ini sudah terdapat beberapa satuan pengamanan wilayah seperti satgas marinir

pengamanan pulau terluar (berupa pos penjagaan), pos TNI Angkatan Laut, Pos Pengamanan Laut (POSAL) Sambu, cukai, kapolsek, koramil, imigrasi, dan syahbandar.

4.2.3 Perumusan Alternatif Program Pengembangan

Dalam pengembangan Kecamatan Belakang Padang dibutuhkan prioritas-prioritas program pengembangan sebagai penentu ke arah mana Kawasan Belakang akan dikembangkan. Penentuan prioritas program pengembangan Kawasan Belakang Padang didasarkan pada program-program rencana daerah yang terkait dengan Kawasan Belakang Padang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, RTRW Kota Batam dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Belakang Padang, serta Matriks Rencana dan Program di Lokasi Prioritas Perbatasan Kota Batam (*Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam*).

Adapun prioritas program pengembangan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat;
2. Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan;
3. Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*;
4. Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu;
5. Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan;
6. Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
7. Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan;

Untuk lebih jelasnya mengenai penetapan alternatif strategi pengembangan ‘Pulau Penawar Rindu’ Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut ini.

Tabel 4.2
Alternatif Program Pengembangan Kawasan "Pulau Penawar Rindu"
Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam

No	Alternatif (Program)	Sub-Program	Sumber
1	Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	Perlindungan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil	RTRW Provinsi Kepulauan Riau
		Penyuluhan, bimbingan, pelayanan dan bantuan pembinaan Komunitas Adat Terpencil	
		Penataan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi penduduk Perkampungan Tua	RTRW Kota Batam
2	Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	Pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir kelautan dan perikanan lainnya	RTRW Provinsi Kepulauan Riau
		Pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	
		Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	
		Optimalisasi pengolahan, pengelolaan, dan pemasaran produk perikanan	
		Pengembangan kegiatan perikanan skala besar	RTRW Kota Batam
3	Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	Penetapan dan perlindungan kawasan suaka alam hutan bakau/*mangrove*	RTRW Kota Batam
4	Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	Pengembangan sentra industri kerajinan yang diarahkan di sentra – sentra kegiatan pariwisata	RTRW Kota Batam
		Pengembangan industri makanan khas Melayu yang diarahkan di lokasi – lokasi perumahan penduduk yang berdekatan dengan kawasan – kawasan pariwisata	
5	Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	Pelestarian dan pengembangan lomba perahu layar dan kesenian Melayu	RTRW Kota Batam
6	Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata	Pengembangan dan penataan pelabuhan utama angkutan antar pulau Kota Batam	RTRW Kota Batam
		Pengadaan pelantar penghubung pulau-pulau yang saling berdekatan	

No	Alternatif (Program)	Sub-Program	Sumber
	Bahari dan Ekowisata	Pengadaan perahu antar pulau di Kota Batam	
		Peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata	
		Pengadaan kapal – kapal wisata	
		Pengembangan kawasan wisata bahari	
		Pengembangan kawasan ekowisata	
		Pengadaan Fasilitas Rekreasi yaitu Bangunan Hotel dan Restoran	RTBL Kawasan Belakang Padang
7	Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	Mempertahankan nilai strategis kawasan yang sangat menentukan dalam menarik batas negara	RTRW Kota Batam
		Mempertahankan nilai strategis kawasan dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah kelautan Indonesia dengan tersedianya lokasi untuk dibangun pos/ pelabuhan tambat bagi Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai patroli keamanan perbatasan dan pengaman pelayaran agar lebih terjamin	
		Pengadaan Kapal Patroli Perbatasan	Matriks Rencana dan Program di Lokasi Prioritas Perbatasan Kota Batam (*Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam*)
		Pelaksanaan Pengawasan Perairan Wilayah Kecamatan Belakang Padang	
		Pengadaan Kapal/Speedboat Surveyor Batas Laut	
		Penataan Revitalisasi Kawasan, Pembangunan Menara/Tugu Perbatasan Pulau Pelampung	
		Rehabilitasi Gedung Koramil Belakang Padang	
		Pengadaan Kendaraan Roda Empat Operasional Pengawasan Perbatasan	
		Pembangunan Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan di Provinsi Kepulauan Riau	

4.2.3.1 Gambaran Umum Setiap Program Pengembangan

Program pengembangan kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam ini terdiri dari 7 alternatif. Berikut gambaran mengenai program pengembangan tersebut:

1. **Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat;**

   Kecamatan Belakang Padang merupakan kecamatan yang tertua di Kota Batam dan mengawali perkembangan Kota Batam hingga saat ini, sehingga di Kecamatan Belakang Padang ini terdapat perkampungan tua dan komunitas-komunitas adat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Perkampungan tua ini sebagian besar tersebar di pulau Belakang Padang yang terdiri dari Kampung Jawa, Kampung Bugis, Kampung Tengah, dan Kampung Tanjung, yang dimana di setiap kampung tersebut dihuni oleh suku-suku sesuai dengan nama kampungnya. Sedangkan Kampung Tengah banyak didiami oleh suku Padang dan dekat pasar oleh suku Cina, serta Kampung Tanjung yang banyak dihuni oleh suku Melayu. Dikarenakan Kecamatan Belakang Padang yang sudah kental dengan adat melayunya sehingga komunitas adat yang ada di Kecamatan Belakang Padang merupakan komunitas adat melayu, sehingga suku-suku lain tidak terlalu menonjol di kecamatan tersebut. Perlunya untuk memperhatikan masyarakat perkampungan tua dan komunitas adat tidak lain adalah untuk menjaga keutuhan Kecamatan Belakang Padang, dimana kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang telaknya terdepan dan perlu untuk dijaga baik dari segi wiayah maupun masyarakat di dalamnya demi kesatuan NKRI.



Sumber : RDTR Kawasan Belakang Padang, 2010

Gambar 4.1
Perkampungan Tua Kecamatan Belakang Padang

2. **Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan;**

   Bentuk Kecamatan Belakang Padang yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki luas wilayah perairan yang lebih besar, menyebabkan sebagian besar penduduk kecamatan tersebut bermatapencaharian sebagai nelayan. Selain itu mereka juga mengembangan budidaya perikanan, sehingga hasil tangkapan mereka kemudian mereka letakkan pada keramba maupun kelong untuk dibudidayakan sebelum kemudian dijual. Hingga saat ini pemerintah sedikit

banyak sudah pernah memberikan bantuan kepada penduduk bermatapencaharian sebagai nelayan tersebut, namun hingga saat ini masih belum terlihat pesatnya perkembangan perikanan di Kecanatan Belakang Padang ini. Oleh sebab itu, perlulah untuk lebih memberdayakan nelayan-nelayan tersebut, serta pengembangan budidaya perikanannya.



Sumber : http://visitbelakangpadang.wordpress.com

Gambar 4.2
Nelayan Tradisional Kecamatan Belakang Padang

3. Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*;

Hingga saat ini, hutan bakau di Kecamatan Belakang Padang sedikit demi sedikit mulai terancam keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan oleh kegiatan-kegiatan seperti penambangan pasir dan industri perkapalan yang berada di sekitarnya yang menyebabkan berkurangnya jumlah pohon bakau di sana. Kini pemerintah Kecamatan Belakang Padang sudah mulai kembali menggalakkan penanaman pohon bakau. Hal tersebut perlu dilakukan demi menjaga keberadaannya serta makhluk hidup lain yang hidup disekitar pohon bakau tersebut. Selain itu hutan bakau juga dapat mencegah terjadinya abrasi pantai, khususnya pada pulau-pulau kecil yang sangat rawan dengan abrasi.



Sumber : Hasil Survey, 2014

Gambar 4.3
Hutan Bakau/*Mangrove* di Kecamatan Belakang Padang

4. **Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu;**

   Industri kerajinan di Kecamatan Belakang Padang memang tidak terlalu terlihat, namun terdapat industri kerajinan rumahan yang memproduksi souvenir berbahan dasar kerang gonggong yang bernama Rumah Kerang. Kerang-kerang terebut dibentuk menjadi berbagai macam pernak pernik cantik, seperti karangan bunga, gantungan kunci, hiasan pensil, dan lainnya. Selain itu di Kecamatan Belakang Padang ini juga terdapat berbagai makanan khas melayu dan makanan laut seperti roti prata, mie lendir, gonggong, dan sotong. Hal tersebut dirasa perlu untuk dikembangkan, karena dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Kecamatan Belakang Padang yang memiliki eksotisme tersendiri ini.



Sumber : http://visitbelakangpadang.wordpress.com

Gambar 4.4
Makanan Khas dan Kerajinan Kerang Kecamatan Belakang Padang

5. **Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan;**

   Kecamatan Belakang Padang memiliki even-even rutin yang diselenggarakan di kecamatan tersebut, seperti lomba sampan layar dan *sea eagle boat*. Lomba-lomba tersebut sengaja diselenggarakan setiap tahunnya untuk meningkatkan nilai-nilai tradisional kawasan tersebut, dan menjaga rasa kekeluargaan dan gotong royong antar sesama masyarakat. Even-even seperti itu dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempromosikan daerahnya agar lebih dapat menarik minat pengunjung untuk datang, selain itu juga bila dikolaborasikan dengan festival melayu misalnya, dapat menjadikan Kecamatan Belakang Padang lebih banyak diketahui oleh orang-orang, dan akhirnya akan berujung pada peningkatan perekonomian daerah.



Sumber : www.tanjungpinangpos.co.id

Gambar 4.5
Even Rutin Tahunan Kecamatan Belakang Padang

6. **Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;**

   Potensi wisata bahari di Kecamatan Belakang Padang mencakup resort wisata bahari dengan kegiatan yaitu *jet ski*, *boat*, restoran *seafood*, *diving*, wisata pantai. Sedangkan potensi ekowisata di Kecamatan Belakang Padang berupa kesenian melayu dan lomba perahu layar serta pasar terapung. Potensi-potensi tersebut juga perlu untuk diperhatikan pengembangannya, karna sama halnya dengan potensi lain, hal tersebut bertujuan untuk menarik minat wisatawan untuk datang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat.



Sumber : RDTR Kawasan Belakang Padang 2010 dan Hasil Survey, 2014

Gambar 4.6
Wisata Bahari dan Ekowisata Kecamatan Belakang Padang

7. **Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-Pulau Terluar/Terdepan**

   Infrastruktur pertahanan dan kemanan yang sudah ada di Kecamatan Belakang Padang ini berupa pos penjagaan pulau terluar, pos TNI Angkatan Laut, Pos Pengamanan Laut Sambu, Kapolsek, Koramil, cukai dan imigrasi, serta syahbandar. Infrastruktur tersebut sangat perlu untuk terus dikembangkan, karena Kecamatan Belakang Padang memiliki lokasi terdepan dan berhadapan langsung dengan Negara Singapura. Apabila sistem pertahanan dan keamanan di kawasan ini kurang, akan berdampak pada keutuhan NKRI. Namun selain pengembangan infrastruktur pertahanan dan keamanan, kegiatan-kegiatan pertahanan dan keamanan juga sangat perlu untuk dilakukan, seperti pengawasan perairan di lokasi-lokasi perbatasan. Hal tersebut sangat perlu untuk diperhatikan karena banyaknya permasalahan di wilayah perbatasan.



Sumber : Profil Kecamatan Belakang Padang 2013

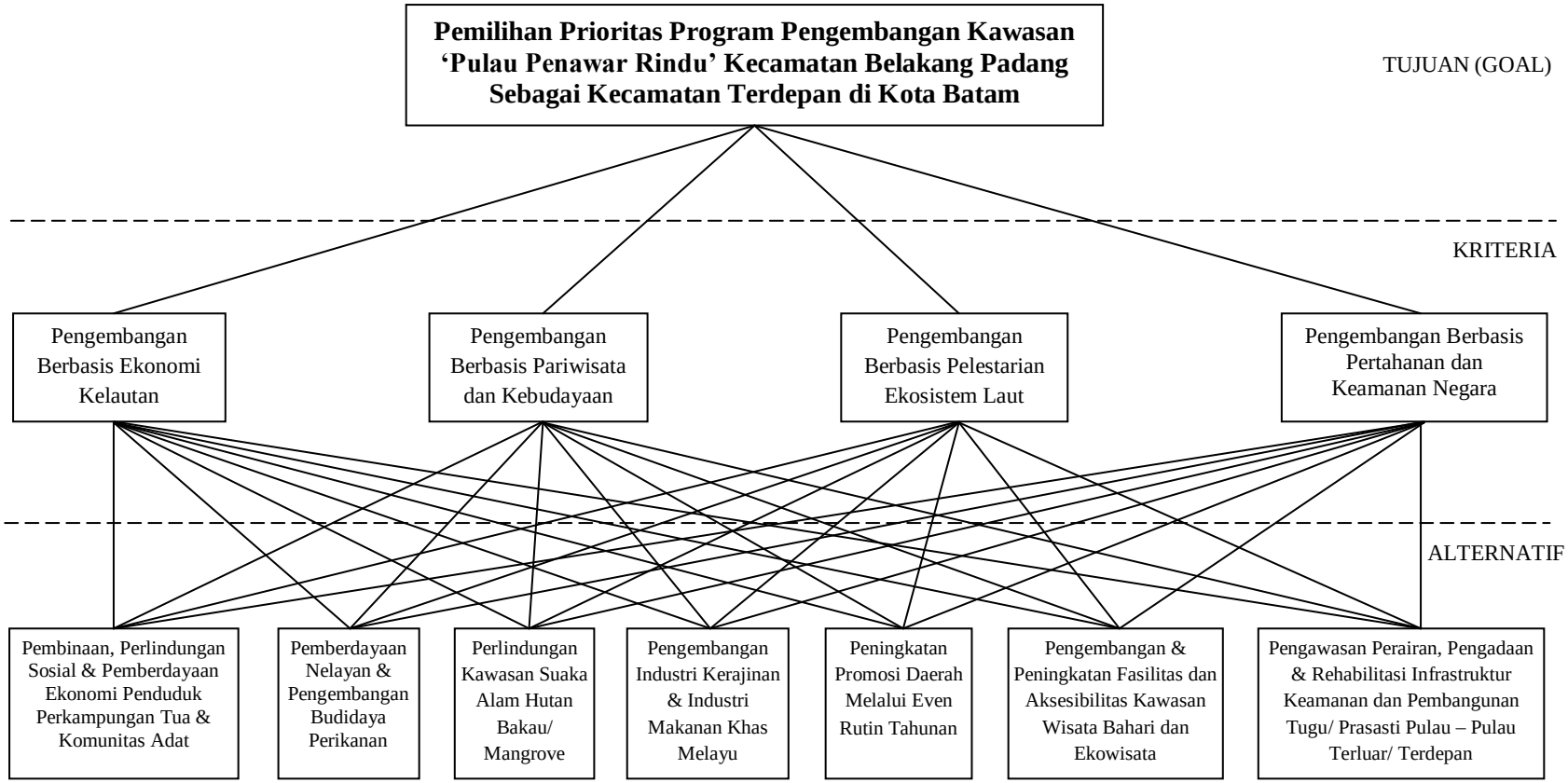
Gambar 4.7
Infrastruktur Keamanan Kecamatan Belakang Padang

4.2.4 Pembentukan Struktur Hirarki

Setelah teridentifikasinya program-program sebagai alternatif program pengembangan Kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam, serta kriteria-kriteria penilaiannya, tahap selanjutnya yaitu pembentukan struktur hirarki AHP. Struktur hirarki dalam penelitian ini terdiri dari tiga level, yaitu:

1. Level pertama merupakan tujuan (*goal*) dari penelitian ini yang ingin dicapai. Adapun tujuan/*goal* yang ingin dicapai yaitu **Pemilihan Prioritas Program Pengembangan Kawasan 'Pulau Penawar Rindu' Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam**.
2. Level kedua merupakan kriteria-kriteria penilaian dalam Pemilihan Prioritas Program Pengembangan Kawasan 'Pulau Penawar Rindu' Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya.
3. Level ketiga merupakan alternatif program pengembangan Kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam yang juga telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Setelah level-level pembentuk hirarki AHP terbentuk, selanjutnya ketiga level tersebut dibentuk ke dalam sebuah struktur hirarki sesuai dengan urutan levelnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana struktur hirarki dalam penelitian ini, dapat dilihat pada **Gambar 4.1** berikut ini:



Gambar 4.8
Struktur Hirarki Pemilihan Prioritas Program Pengembangan Kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam

4.3 Proses Penilaian AHP

Penilaian AHP dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama yaitu dengan merata-ratakan hasil jawaban responden, dimana responden dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) ahli/*expert*. Tahap akhir yaitu menghitung bobot prioritas lokal dan bobot prioritas global dengan menggunakan *software Expert Choice 11*.

4.3.1 Matriks Perbandingan Berpasangan

Penelitian dengan menggunakan analisis AHP ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap setiap kriteria yang mempengaruhi pemilihan prioritas program pengembangan kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan berpasangan antar setiap kriteria dan alternatif dengan asumsi tingkat kepentingan dari setiap kriteria dan alternatif terhadap kriteria dan alternatif lainnya. Hasil penilaian dari ahli-ahli tersebut kemudian dibentuk ke dalam sebuah matriks berordo sesuai dengan jumlah kriteria dan alternatif. Berdasarkan hal tersebut, matriks dalam penelitian ini terdiri dari matriks ordo 4 x 4 untuk perbandingan berpasangan setiap kriteria dan matriks ordo 7 x 7 untuk perbandingan berpasangan setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria.

Tabel 4.3
Matriks Ordo 4 x 4 untuk Kriteria

Kriteria	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}
Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.4
Matriks Ordo 7 x 7 untuk Alternatif

Alternatif	Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	a_{71}	a_{72}	a_{73}	a_{74}	a_{75}	a_{76}	a_{77}

Sumber : Hasil Analisis, 2014

4.3.2 Tahap Merata-Ratakan Hasil Jawaban Seluruh Responden

Dalam penelitian ini responden terdiri dari 6 responden, maka hasil jawaban dari responden-responden tersebut perlu dirata-ratakan untuk membentuk matriks ordo 4 x 4 dan 7 x 7 agar dapat dihitung bobot prioritas setiap kriteria dan alternatif. Berikut tahap-tahap untuk membentuk matriks ordo dengan contoh matriks ordo 4 x 4 untuk setiap kriteria:

a. Hasil jawaban setiap responden dari kuesioner yang telah diajukan, dimasukkan kedalam tabel. Apabila angka yang dipilih responden berada di sebelah kiri, maka angka tersebut tetap dengan nilainya, namun apabila angka yang dipilih responden berada di sebelah kanan, maka angka tersebut menjadi *⅟*.. untuk sel dibagian atas sel yang diagonal, sedangkan pada sel yang diagonal berisi angka 1, dan sel dibagian bawah sel diagonal berisikan angka *invert*/kebalikan dari angka-angka yang berada pada sel di atas sel diagonal. Berikut contoh cara memasukan jawaban responden kedalam sebuah tabel perbandingan berpasangan sebelum dirata-ratakan:

Tabel 4.5
Contoh Jawaban Responden 1

No	Kriteria-kriteria dalam Pemilihan Prioritas Program Pengembangan Kawasan 'Pulau Penawar Rindu' Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam																		
1	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	9	8	7	6	5	4	③	2	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	9	8	7	6	5	4	3	2	①	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut
3	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	9	8	7	6	5	4	3	2	①	2	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
4	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	9	8	7	6	5	4	3	2	**1**	②	3	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut
5	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	9	8	7	6	5	4	3	2	**1**	2	3	4	⑤	6	7	8	9	Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
6	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	9	8	7	6	5	4	3	2	**1**	2	③	4	5	6	7	8	9	Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.6
Contoh Hasil Jawaban Responden 1

Kriteria	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	1.00	3.00	1.00	1.00
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	0.33	1.00	0.50	0.20
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	1.00	2.00	1.00	0.33
Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	1.00	5.00	3.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2014

b. Selanjutnya dilakukan penghitungan rata-rata. Rata-rata jawaban responden untuk setiap kriteria/alternatif dihitung dengan cara mengalikan setiap jawaban perbandingan berpasangan yang sama dari responden 1 sampai responden ke-n, kemudian diakar sebanyak jumlah responden, apabila jumlah responden ada 6 maka hasil pengalian tersebut kemudia diakar pangkat 6 ($\sqrt[6]{x}$). Sebagai contoh untuk menghitung nilai rata-rata jawaban responden untuk alternatif digunakan dua sampel jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Jawaban Responden 1

Kriteria	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	1.00	3.00	1.00	1.00
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	0.33	1.00	0.50	0.20
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	1.00	2.00	1.00	0.33
Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	1.00	5.00	3.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.8
Hasil Jawaban Responden 2

Kriteria	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	1.00	5.00	5.00	5.00
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	0.20	1.00	5.00	5.00
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	0.20	0.20	1.00	1.00
Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	0.20	0.20	1.00	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Sebagai contoh nilai perbandingan berpasangan antara Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan dan Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan dari responden 1 dan responden 2 dikalikan, kemudian diakarkan ($= \sqrt[2]{3.00 \times 5.00}$). Begitu juga untuk nilai-nilai perbandingan berpasangan lainnya dari setiap responden. Berikut contoh hasil rata-rata dari kedua responden tersebut:

Tabel 4.9
Hasil Rata – Rata Jawaban Responden

Kriteria	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	1.000	3.873	2.236	2.236
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	0.258	1.000	1.581	1.000
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	0.447	0.632	1.000	0.577
Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	0.447	1.000	1.732	1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Hasil rata-rata jawaban dari setiap responden inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam program *expert choice* untuk mendapatkan hasil bobot prioritas lokal dan global dari setiap kriteria dan alternatif.

4.3.2.1 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Matriks perbandingan berpasangan antar kriteria ini merupakan matriks berordo 4 x 4 yang berisi nilai rata-rata dari seluruh jawaban responden berdasarkan kuesioner yang telah diajukan yaitu pertanyaan no 1 sampai 6 (kuesioner dan jawaban responden dapat dilihat pada **Lampiran**). Hasil rata-rata dari seluruh jawaban responden mengenai perbandingan berpasangan antar kriteria tercantum pada **Tabel 4.10** berikut ini:

Tabel 4.10
Matriks 4 x4
Nilai Rata – Rata Perbandingan Berpasangan Antar Setiap Kriteria

Kriteria	Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	1.000	2.513	1.165	1.809
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	0.398	1.000	0.854	0.434
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	0.858	1.170	1.000	0.490
Pengambangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	0.553	2.305	2.040	1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2014

4.3.2.2 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif Terhadap Setiap Kriteria

Matriks perbandingan berpasangan antar alternatif ini merupakan matriks berordo 7 x 7 yang berisi nilai rata-rata jawaban seluruh responden berdasarkan kuesioner yang telah diajukan yaitu pertanyaan no 7 sampai 90. Berikut hasil rata-rata dari seluruh jawaban responden mengenai perbandingan berpasangan antar alternatif terhadap masing-masing kriteria:

Tabel 4.11
Matriks 7 x 7
Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif Terhadap Kriteria Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan

Alternatif	Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	1.000	0.227	0.721	0.723	0.570	0.314	0.350
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	4.409	1.000	4.174	3.608	2.418	1.388	0.924
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	1.388	0.240	1.000	0.947	1.224	0.842	0.306
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	1.383	0.277	1.056	1.000	2.737	0.567	0.405
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	1.754	0.414	0.817	0.365	1.000	0.450	0.342
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	3.188	0.721	1.187	1.763	2.221	1.000	0.686
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	2.854	1.082	3.271	2.466	2.928	1.458	1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.12
Matriks 7 x 7
Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif Terhadap Kriteria Pengembangan Berbasis Pariwisata & Kebudayaan

Alternatif	Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	1.000	0.702	0.935	0.664	0.858	0.249	0.521
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	1.424	1.000	1.246	0.970	1.130	0.553	0.493
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	1.070	0.802	1.000	1.031	0.567	0.271	0.450
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	1.506	1.031	0.970	1.000	0.891	0.410	1.000
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	1.165	0.885	1.763	1.122	1.000	0.482	1.348
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	4.017	1.809	3.684	2.438	2.076	1.000	1.979
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	1.919	2.030	2.221	1.000	0.742	0.505	1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.13
Matriks 7 x 7
Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif Terhadap Kriteria Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut

Alternatif	Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	1.000	0.502	0.333	0.729	1.103	0.442	0.450
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	1.992	1.000	1.000	3.225	1.849	1.830	1.201
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	3.004	1.000	1.000	2.239	2.513	1.661	1.698
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	1.372	0.310	0.460	1.000	1.089	0.618	0.547
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0.907	0.541	0.386	0.918	1.000	0.472	0.442
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	2.265	0.547	0.602	1.619	2.117	1.000	1.468
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	2.221	0.833	0.589	1.830	2.265	0.681	1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Tabel 4.14
Matriks 7 x 7
Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif Terhadap Kriteria Pengembangan Berbasis Pertahanan & Keamanan Negara

Alternatif	Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	1.000	0.715	2.117	1.886	1.308	1.648	0.277
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	1.399	1.000	1.817	2.054	1.919	1.523	0.269
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	0.472	0.550	1.000	1.751	2.587	0.490	0.331
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	0.530	0.487	0.571	1.000	0.970	0.405	0.222
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0.765	0.521	0.386	1.031	1.000	0.344	0.203
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	0.607	0.656	2.040	2.466	2.904	1.000	0.302
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	4.050	3.714	3.018	4.509	4.919	3.313	1.00

Sumber : Hasil Analisis, 2014

4.3.3 Hasil Bobot Prioritas Lokal dan Bobot Prioritas Global

Pembobotan setiap kriteria dan alternatif dalam penelitian ini menggunakan *software Expert Choice 11*. Namun penghitungan bobot ini juga dapat dihitung dengan cara manual. Berikut hasil akhir dari pengolahan data menggunakan *software Expert Choice 11*:

Tabel 4.15
Bobot Prioritas Lokal Setiap Kriteria

Kriteria	Bobot Prioritas Lokal
Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan	0,361
Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan	0,142
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut	0,199
Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara	0,298
Consistency Ratio : 0,05	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Pada **Tabel 4.15** didapatkan hasil analisis bobot prioritas lokal setiap kriteria. Berdasarkan **Tabel 4.15** kriteria yang memiliki bobot prioritas lokal tertinggi yaitu Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan denga nilai 0,361 dan nilai *consistency ratio* dari pembobotan setiap kriteria tersebut yaitu 0,05 yang berarti pembobotan yang telah dilakukan konsisten dan hasil penilaiannya dapat diterima. Selanjutnya, hasil pembobotan prioritas lokal setiap alternatif terhadap kriteria pengembangan berbasis ekonomi kelautan dapat dilihat pada **Tabel 4.16** berikut ini:

Tabel 4.16
Bobot Prioritas Lokal Setiap Alternatif Terhadap Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan

Alternatif	Bobot Prioritas Lokal
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	0,061
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	0,266
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	0,089
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	0,105
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0,078
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	0,163
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	0,238
Consistency Ratio : 0,03	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Berdasarkan **Tabel 4.16** didapatkan bobot prioritas lokal dari setiap alternatif terhadap kriteria pengembangan berbasis ekonomi kelautan. Alternatif yang memiliki bobot prioritas lokal tertinggi terhadap kriteria pengembangan berbasis ekonomi kelautan adalah Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan dengan bobot sebesar 0,266 dan nilai *consistency ratio* sebesar 0,03 yang berarti pembobotan yang telah dilakukan konsisten dan hasil penilaiannya dapat diterima. Untuk bobot prioritas lokal setiap alternatif terhadap pengembangan berbasis pariwisata dan kebudayaan dapat diliha pada **Tabel 4.17** berikut ini:

Tabel 4.17
Bobot Prioritas Lokal Setiap Alternatif Terhadap Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan

Alternatif	Bobot Prioritas Lokal
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	0,085
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	0,121
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	0,088
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	0,120
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0,138
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	0,290
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	0,158
Consistency Ratio : 0,02	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Dapat dilihat pada **Tabel 4.17** bobot prioritas lokal tertinggi dari setiap alternatif terhadap pengembangan berbasis pariwisata dan kebudayaan yaitu Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata dengan bobot sebesar 0,290 dan nilai *consistency ratio* sebesar 0,02 yang berarti pembobotan yang telah dilakukan konsisten dan hasil penilaiannya dapat diterima. Hasil pembobotan prioritas lokal dari setiap alternatif terhadap kriteria pengembangan berbasis pelestarian ekosistem laut dapat dilihat pada **Tabel 4.18** berikut ini:

Tabel 4.18
Bobot Prioritas Lokal Setiap Alternatif Terhadap
Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut

Alternatif	Bobot Prioritas Lokal
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	0,078
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	0,212
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	0,226
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	0,089
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0,082
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	0,159
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	0,154
Consistency Ratio : 0,01	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Pada **Tabel 4.18** bobot prioritas lokal tertinggi dari setiap alternatif terhadap kriteria pengembangan berbasis pelestarian ekosistem laut yaitu Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove* dengan bobot sebesar 0,226 dan nilai *consistency ratio* sebesar 0,01 yang berarti pembobotan yang telah dilakukan konsisten dan hasil penilaiannya dapat diterima. **Tabel 4.19** berikut merupakan hasil pembobotan prioritas lokal setiap alternatif terhadap kriteria pengembangan berbasis pertahanan dan keamanan negara:

Tabel 4.19
Bobot Prioritas Lokal Setiap Alternatif Terhadap
Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan Negara

Alternatif	Bobot Prioritas Lokal
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	0,132
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	0,145
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	0,096
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	0,062
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0,063
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	0,131
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	0,371
Consistency Ratio : 0,03	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Bobot prioritas lokal dengan nilai tertinggi dari setiap alternatif terhadap kriteria pengembangan berbasis pertahanan dan keamanan negara berdasarkan **Tabel 4.19** adalah Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan yang berbobot 0,371 dan nilai *consistency ratio* sebesar 0,03 yang berarti pembobotan yang telah dilakukan konsisten dan hasil penilaiannya dapat diterima. Dari hasil pembobotan prioritas lokal yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dihasilkan bobot prioritas global dari alternatif terhadap seluruh kriteria yang ada. Hasil pembobotan prioritas global dari setiap alternatif dapat dilihat pada **Tabel 4.20** berikut ini:

Tabel 4.20
Bobot Prioritas Global Setiap Alternatif

Alternatif	Bobot Prioritas Global
Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat	0,085
Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan	0,205
Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*	0,125
Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu	0,094
Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan	0,084
Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata	0,172
Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan	0,236
Consistency Ratio : 0,03	

Sumber : Hasil Analisis 2014

Dapat dilihat pada **Tabel 4.20** bobot prioritas global tertinggi dari setiap alternatif terhadap setiap kriteria yang ada dimiliki oleh prioritas program Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan dengan bobot prioritas global sebesar 0,236 dan nilai *consistency ratio* sebesar 0,03 yang berarti pembobotan yang telah dilakukan konsisten dan hasil penilaiannya dapat diterima.

Berdasarkan bobot prioritas global yang telah dihasilkan, dapat disimpulkan hasil prioritas program pengembangan kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam sebagai berikut:

1. Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-pulau Terluar/Terdepan (0,236);
2. Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan (0,205);
3. Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata (0,172);
4. Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove* (0,125);
5. Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu (0,094);
6. Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat (0,085);
7. Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan (0,084).